



TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

DIRGAHAYU
Enam 48th
Winda
 LEMHANNAS RI
 20 MEI 1965 - 20 MEI 2013

Kartini

the Beautiful and Revolutionary

Senin (22/4) diselenggarakan acara peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April kemarin di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Jakarta. Peringatan ini mengangkat tema "Peran Potensial Perempuan Indonesia dalam Percepatan Kebangkitan Peradaban Indonesia".

Acara yang digagas oleh Jenny Rachman ini didedikasikan secara tulus dan ikhlas guna mewujudkan kaum perempuan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat serta terwujudnya kesejahteraan bagi kelangsungan hidup khususnya kaum perempuan Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Linda Amalia Sari, SIP, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Dr. Syarif Hasan, MM, MBA., dan Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.,

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Dr. Syarif Hasan, MM, MBA, yang membuka acara tersebut mengatakan dengan momentum dan semangat Kartini, semua perempuan di Indonesia terutama para generasi muda perempuan meneruskan cita-cita kartini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

bersambung ke hal. 2....

DAFTAR ISI



Foto: Humas Lemhannas

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. yang juga turut diundang, dalam sambutannya mengatakan peran perempuan Indonesia akan sangat berperan besar dalam mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan sikap kepeduliannya atas pengarusutamaan kesetaraan gender dengan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan strategis diantaranya seperti peran perempuan dalam partai politik yang harus mencapai kuota 30%.

Membaca kutipan dari Dr. Cipto Mangunkusumo dalam Kartini, *De Expres-1912* "Tiap-tiap halaman surat Kartini menyatakan kerinduannya untuk melihat rakyatnya Bangun! Bangkit! Bangkit dan Bangkit dari keadaan tidur pulas yang telah beratus-ratus tahun mencekam mereka", Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga menjelaskan bagaimana sosok Kartini, selain memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam kesetaraan, secara lebih besar Kartini juga telah memperjuangkan hak dan martabat bangsa Indonesia yang telah beratus-ratus tahun terjajah.

Sedangkan dalam acara *Talkshow "Perempuan dan Leadership"* Peran Strategis Perempuan Dalam Kemajuan Indonesia, hadir sebagai pembicara Ketua Umum IWAPI Ir. Nita Yudi, Staf Ahli Menteri Bidang Konstitusi dan Ideologi Menkopolkum dan Ketua Dewan Kehormatan Tarman Azzam. Tak hanya itu, kegiatan ini juga mengadakan bazaar yang menghadirkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh para perempuan Indonesia.

Turut hadir Hj. BRA. Mooryati Soedibyo, SS., M.Hum, Dewi Mothik, Yati Octavia dan beberapa tokoh perempuan lainnya serta para undangan.



1 *Kartini the Beautiful and Revolutionary*



3 *Intellectual Exercise Dewan Pengarah*



4 *Perempuan Memiliki Akses Dan Peluang Yang Sama Menjadi Pemimpin*



5 *Pembangunan Kependudukan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*



6 *Jelang HUT ke -48, Lemhannas RI Menggelar Perlombaan*



8 *Roundtable Discussion: Peran Indonesia Dalam Asean Community*



9 *Indonesia Perlu Pengaturan Lalu-Lintas Ruang Udara Nasionalnya*



10 *Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*



11 *Wakil Presiden RI: Peran Institusi Berkualitas Faktor Penentu Keberhasilan Suatu Bangsa*



12 *Lemhannas RI Selenggarakan Donor Darah*

REDAKSI

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S.,

Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan

Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>



Foto: Humas Lemhannas RI

Intellectual Exercise Dewan Pengarah

Satu orang Tenaga Pengajar dan dua orang Tenaga Profesional Lemhannas RI hadir sebagai pemapar dalam acara *Intellectual Exercise* Dewan Pengarah Lemhannas RI pada hari Selasa, (23/4), di Gedung Astagatra Lt. IV Lemhannas RI.

Kegiatan *Intellectual Exercise* yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. ini bertujuan untuk mengasah *knowledge* dan *skills* para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji maupun Tenaga Profesional dengan menumbuhkembangkan kehidupan akademik guna mengasah kemampuannya. *Intellectual Exercise* ini merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi implementasi dari kebijakan umum Dewan Pengarah Lemhannas RI.

Mayjen TNI Djumadi selaku Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Lemhannas RI yang hadir sebagai salah satu dari tiga pemapar dalam kegiatan tersebut, mengangkat tentang Optimalisasi Penanganan Konflik Horizontal di Daerah guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional. Menurutnya, Kemajemukan masyarakat Indonesia selain berpengaruh positif, dapat juga menjadi ancaman yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terakumulasinya konflik yang terjadi di daerah akan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional sehingga akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu dibentuk pusat krisis (*crisis center*) mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Dua orang lainnya adalah Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri/Sismennas Lem-

hannas RI Dr. Kausar AS, M.Si dan Tenaga Profesional Bidang Pertahanan Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) I Gusti Putu Buana S.AP, M.Sc.

Dr. Kausar AS, M.Si mengangkat topik tentang Penguatan Sistem dan Manajemen Implementasi Peran dan Fungsi, Hirarkhi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ia menjelaskan tujuh elemen dasar pemerintahan daerah yakni, urusan pemerintahan, kelembagaan, personil/kepegawaian, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan. Menurutnya tujuh elemen ini harus ditata agar menjadi pondasi yang kuat bagi tiap daerah dalam upayanya melaksanakan otonomi daerah secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Meningkatkan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar guna Menegakkan Kedaulatan Negara dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional merupakan tema yang diangkat oleh Mayjen TNI (Purn) I Gusti Putu Buana S.AP, M.Sc. Dalam paparannya, ia menjelaskan upaya-upaya untuk mengamankan pulau-pulau terdepan agar tidak diambil alih oleh pihak asing, sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat secara bersinergi, harus dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka memantapkan *effective occupation* dan *exercise of sovereignty* atas seluruh wilayah NKRI terutama terhadap pulau-pulau terdepan.

Selain para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, turut hadir pula Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, serta undangan lainnya.

Perempuan Memiliki Akses Dan Peluang Yang Sama Menjadi Pemimpin



Foto : Humas Lemhannas

Kamis, (25/4), Lemhannas RI mengadakan *Coffee Morning* Gubernur Lemhannas RI dengan para Pimpinan redaksi dan Wartawan Media Cetak/Elektronik yang mengangkat tema **“Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan Nasional”** di Ruang Nusantara Gedung Trigatra. Acara tersebut menghadirkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Linda Amalia Sari, S.IP.

Dalam paparannya, Ibu Linda Amalia Sari S.IP menjelaskan Indonesia sebenarnya telah menjadi perintis kepemimpinan perempuan sejak dari masa kerajaan pra kolonial. Menurutnya, telah banyak contoh teladan pemimpin perempuan saat itu yang disegani rakyatnya seperti Ratu Sinuhun di Palembang, Ratu Dayang Lela di Kalimantan Barat, Ratu Daeng Pasuli di Sulawesi Selatan, Ratu We Tanri Ole di Ternate, Sultanah Tajuk Alam Safiatuddin Syah di Aceh, Ratu Tribuwana Tungga Dewi (Majapahit) dan Laksamana Keumalahayati (Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah jelas bahwa setiap warga Negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “perempuan sebenarnya memiliki akses dan peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang pembangunan”, tegasnya.

Namun, menurutnya juga masih ada *“glass ceiling”* budaya patrilineal yang menghalangi perempuan untuk

berorganisasi dan berekspresi yang ditandai dengan relasi gender dalam keluarga, cenderung menghambat karier perempuan di jabatan publik.

“pola pikir patriarki bukan saja terjadi dalam pola hubungan informal tetapi juga kekuasaan formal”, ucapnya. Menurutnya pola pikir tersebut tercermin setiap produk kebijakan yang masih bias akan hal gender.

Pemerintah melalui Kementerian yang ia pimpin, telah melakukan upaya-upaya sebagai *affirmative action* seperti melakukan Kesepakatan bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender.

Selain itu juga, telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama 4 (empat) menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PP-PA tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsive Gender* (PPRG) di berbagai bidang pembangunan.

Dalam *Coffee Morning* yang rutin diselenggarakan tiap dua bulan sekali, hadir Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, beserta jajarannya dan hadir pula jajaran dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pembangunan Kependudukan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Demografi atau kependudukan, merupakan salah satu dari tiga aspek alamiah yang dipandang sebagai anugerah dan modalitas utama pembangunan bangsa yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan cerdas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Keunggulan komparatif tersebut harus diimbangi dengan keunggulan kompetitif yang bersumber pada kualitas sumber daya manusia atau kependudukan.

Hal inilah yang menjadi alasan diadakannya Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Koalisi untuk Kependudukan pada hari Sabtu, (27/4) di Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI HR. Agung Laksono.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Dalam perspektif Ketahanan Nasional, aspek kependudukan (demografi) merupakan salah satu aspek gatra alamiah yang memiliki kontribusi dan berperan penting dalam proses pembangunan bangsa. Besarnya jumlah penduduk, menurutnya merupakan kekuatan yang dapat menggerakkan roda pembangunan nasional.

Dengan perspektif tersebut, pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, sumber daya manusia

memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan Ketahanan Nasional yang tangguh.

“sumber daya manusia merupakan titik sentral kependudukan, maka langsung maupun tidak langsung, pembangunan kependudukan memiliki peranan yang sangat vital terhadap lima aspek dinamis kehidupan sosial (Pancagatra)”, tegas Gubernur Lemhannas RI.

Melanjutkan penjelasannya, Gubernur berpendapat bahwa pembangunan kependudukan Indonesia, baik dalam gatranya sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, maupun sebagai himpunan kuantitas, sangat erat kaitannya dengan Ketahanan Ideologi/Politik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Budaya dan Ketahanan Pertahanan Keamanan. Dengan kata lain, pembangunan kependudukan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran ketahanan nasional, baik sebagai konsepsi maupun sebagai kondisi.

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, mobilisasi penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingannya.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, jika dihadapkan pada berbagai persoalan kependudukan dan bonus demografi yang menjadi *windows of opportunity*, keberhasilan pembangunan kependudukan dalam perspektif Ketahanan Nasional akan melibatkan faktor dan peran kepemimpinan maupun kependudukan secara sinergis dengan basis pada kekuatan Moral, Kompetensi, Perilaku dan Wawasan kebangsaan keduanya.



Foto: Humas Lemhannas

Galeri Foto:

Jelang HUT ke - 48, Lemhannas RI Menggelar Perlombaan

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 48, Lemhannas RI menyelenggarakan beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan pertandingan olahraga seperti bola volley, tenis meja, tenis lapangan, futsal, serta lomba pengucapan Sapta Marga, Tri Brata dan Panca Prasetya Korpri.

Penyelenggaraan pertandingan yang dilakukan tersebut tidak hanya sekedar pertandingan olahraga, tetapi lebih kepada kebersamaan antar personil Lemhannas RI yang diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai itu sendiri.





Roundtable Discussion: Peran Indonesia Dalam Asean Community



Foto: Humas Lemhannas

Selasa (30/4), *Roundtable Discussion* tentang Peningkatan Peran Indonesia dalam Asean *Framework on Equitable Economic Development* (EED) dalam rangka Ketahanan Nasional diselenggarakan di Ruang Nusantara I Gedung Tri Gatra Lemhannas RI.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA tersebut dihadiri Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Hadir sebagai Pembicara adalah Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi yang diwakili oleh Dr. Rizal E. Halim, Direktur *Executive Asean Foundation* yang diwakili oleh Dubes Eddi Haryadhi dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dr. Telisa Felianty. Sedangkan hadir sebagai penanggung, Deputi VI Bid Kerjasama

Ekonomi & Pembiayaan Internasional Kemenko Perekonomian RI Rizal Affandi Lukman, Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI yang diwakili Iwan Suyudhi Amri, Tenaga Profesional Bidang Strategi & Hubungan Internasional Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan dan Direktur Internasional Bank Indonesia Aida Budiman.

Komunitas Asean (*Asean Community*) sendiri dibentuk dengan tujuan untuk lebih mempererat integrasi Asean dalam menghadapi perkembangan konstelasi internasional, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ketika Indonesia menjadi ketua KTT Asean di Bali tahun 2003, Indonesia telah mensponsori keseimbangan kerja sama Asean yang dikemas dalam *charter of the Asean*, melalui program tercapainya *Asean community* de-

ngan semboyan *one vision, one identity and one community*, yang menjamin terimplementasinya pilar *political-security community, economic community*, dan *socio-cultural community*.

Indonesia sebagai negara anggota Asean yang mensponsori *Charter of the Asean*, harus mampu mengambil keuntungan dan menjadi pemain pada saat *Asean Community* terimplementasi tahun 2015. Untuk itu, spirit nasionalisme dan semangat kebangsaan pada masyarakat maupun para elitis dalam menghadapi *Asean Community* khususnya perwujudan masyarakat ekonomi *Asean* 2015 perlu terus digelorakan, guna memperkokoh ketahanan nasional.

Gubernur Lemhannas RI berharap dari kegiatan ini muncul pemikiran dan masukan-masukan bagi Lemhannas RI dalam menyusun *policy recommendation* yang akan digunakan Presiden untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan *Asean equitable economic development*. Sehingga nanti akan dapat dihasilkan formulasi-formulasi kebijakan guna menurunkan GAP pembangunan dan akan memperlancar proses integrasi *Asean* ke depannya, sehingga akan terwujud kesetaraan di kawasan *Asean*.

Roundtable Discussion ini dihadiri pula oleh para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta undangan lainnya.

Indonesia Perlu Pengaturan Lalu-Lintas Ruang Udara Nasionalnya

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang paling besar dan wilayahnya sangat luas, sehingga Indonesia memiliki ruang udara yang sangat luas untuk digunakan oleh wahana udara bagi kepentingan penerbangan sipil maupun militer. Oleh karena hal itu, Indonesia harus memiliki kemampuan pengaturan lalu-lintas ruang udara nasional yang tidak hanya untuk keselamatan penerbangan dan penegakan kedaulatan Negara, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

Hal inilah yang membuat Lemhannas RI pada hari Rabu (1/5), menyelenggarakan *Roundtable Discussion* yang mengangkat Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Roundtable Discussion ini menghadirkan Pengamat Penerbangan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, Pakar Hukum Udara Prof. Priyatna Abdurasyid, SH, MH. dan perwakilan dari Direktur Navigasi Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Elvi Amir sebagai Pembicara. Sedangkan



Foto : Humas Lemhannas

sebagai Penanggap adalah Kas Kohanudnas Marsma TNI Bonar Hutagaol, Pakar Hukum Udara Prof. Dr. HK. Martono, SH, LLM dan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI M. Nasir Majid dan Direktur *Air Fast* Indonesia Erlangga Suryadarma.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa sampaisaat ini sebagian pengendalian *Flight Information Region (FIR)* masih diatur oleh Negara tetangga karena berbagai alasan. Dari aspek ekonomi,

hal ini tidak menguntungkan bagi Negara Indonesia karena tidak adanya "fee" pemasukan dari *Air Service Route Charge*. Sedangkan dari aspek pertahanan Negara sangat membatasi penerbangan TNI, termasuk peluang adanya penetrasi melalui udara oleh kekuatan udara Negara asing.

Besar harapan Gubernur Lemhannas RI dalam penyelenggaraan *Roundtable Discussion* ini akan muncul dan lahir pemikiran-pemikiran strategis untuk menjadi sumbang saran dalam kajian "Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI"



Foto : Humas Lemhannas

Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja diselenggarakan pada hari Rabu (1/5) di Auditorium Lemhannas RI.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, MSc menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Dra. Nadimah, MBA. dan Driektur Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Nasional Drs. Purwanto, MM. Sosialisasi yang dimoderatori oleh Marsekal Muda TNI Beng Tardjani tersebut dihadiri para pejabat eselon I, II, III dan IV serta staf Lemhannas RI.

Dalam penjelasannya, Dra. Nadimah, MBA menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 46/2011 penilaian berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian prestasi kerja mencakup unsur-unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja.

Pada kesempatan berikutnya, Drs. Purwanto, MM mengatakan Perka BKN No. 1 Tahun 2013 merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan PP Nomor 46/2011 pasal 11, pasal 14, dan pasal 18. Perka BKN ini mulai berlaku pada sejak peraturan ini diundangkan dan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri sipil yang dinilai.



Foto : Humas Lemhannas

Wakil Presiden RI: Peran Institusi Berkualitas Faktor Penentu Keberhasilan Suatu Bangsa

Dalam rangka HUT ke 48 Lemhannas RI dan HUT ke 35 IKAL, Lemhannas RI bersama IKAL menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Paradigma Baru Pembangunan Nasional: Membangun Indonesia Masa Depan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada hari Rabu (8/5) di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta.

Seminar dibuka oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono dan dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi RI Gusti Muhammad Hatta, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Ketua Umum IKAL Agum Gumelar., pejabat Struktural Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional Lemhannas RI, para Peserta PPRA 49 dan PPRA 50 serta undangan lainnya.

Seminar ini juga dihadiri oleh para pakar dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan ini bertujuan untuk membahas konsep dan pemikiran cerdas membangun Indonesia masa depan yang lebih maju, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa mulai beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode tahun 2020 – 2030. “Kondisi ini, tentu harus dipersiapkan sedini mungkin dimanfaatkan sedini mungkin, agar bonus demografi tersebut sungguh – sungguh dapat memberi manfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat di masa depan”, ungkapnya.

Menurutnya, pendidikan iptek yang tepat, konsisten dan berkelanjutan merupakan langkah strategis yang perlu dan harus menjadi pilihan utama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Pada kesempatan berikutnya Wakil Presiden RI, menyatakan bahwa Indonesia perlu mencari sistem ekonomi yang ideal dan cocok dengan segala ke-khas-an Indonesia. “sistem teknoekonomi pun harus terintegrasi dengan aspek sosial politik di dalam negara tersebut”, tuturnya.

Namun hal yang paling mendasar adalah peran dari institusi yang berkualitas, menurutnya hal itulah yang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bangsa dengan jalan membangun, menata dan memperbaiki institusi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ia juga menegaskan bahwa yang paling utama dan mendasar adalah pada institusi politik, karena disanalah awal mula terciptanya aturan-aturan main yang mendasar termasuk ke dalam bidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun sosial dan budaya.

Dalam penutup sambutannya, Wakil Presiden RI mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan politik oleh para putra dan putri terbaik bangsa, oleh karena itu jangan sampai kita membiarkan para putra dan putri terbaik bangsa malah menjauhi politik.

Lemhannas RI Selenggarakan Donor Darah



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas

Senin (13/5), Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. Acara yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke 48 Lemhannas RI ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Kegiatan donor darah ini didukung oleh Tim Unit Transfusi Darah dari PMI DKI Jakarta. Donor darah merupakan aksi kemanusiaan dalam rangka menolong jiwa manusia, karena kebutuhan darah bagi kelangsungan hidup manusia memang hal yang tak terbantahkan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan donor darah ini memiliki satu tujuan, yaitu menyelamatkan jiwa orang lain, karena ini merupakan manifestasi yang paling nyata dari rasa kemanusiaan yang semurni-murninya.

Gubernur berharap dengan kegiatan ini muncul semangat dan kesadaran dalam diri akan pentingnya persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Melalui kegiatan ini, diharapkan kepekaan dan kepedulian akan semakin besar terhadap penderitaan sesama yang membutuhkan.

Hadir dalam kegiatan donor darah tersebut, adalah Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga Profesional Lemhannas RI, Ketua Perista Lemhannas RI, para Pejabat Struktural, Pengurus Perista, dan personil Lemhannas RI lainnya,